

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Keanggotaan Indonesia dalam BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan) menawarkan peluang strategis yang signifikan untuk memperkuat posisi ekonomi dan politik Indonesia di panggung global, sekaligus mendukung transformasi domestik menuju pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Penelitian ini telah menganalisis secara mendalam potensi ekonomi politik Indonesia melalui keanggotaannya dalam BRICS, dengan fokus pada peluang ekspor-impor, investasi asing langsung (FDI), prospek ekonomi nasional, dan aliansi strategis. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dan kerangka teoritis kepentingan nasional (Morgenthau, 1948) serta konsep organisasi internasional (Keohane & Nye, 1977), penelitian ini mengungkapkan bahwa BRICS bukan hanya platform kerja sama ekonomi, tetapi juga alat geopolitik untuk memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang dalam tatanan dunia yang lebih multipolar.

Secara ekonomi, keanggotaan BRICS membuka peluang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan kinerja ekspor dan impor. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2024, ekspor non-migas Indonesia ke negara-negara BRICS mencapai US\$84,37 miliar, menyumbang 33,91% dari total ekspor non-migas nasional. Komoditas utama seperti besi dan baja, bahan bakar mineral, nikel, batu bara, dan minyak kelapa sawit memiliki pasar yang besar di negara-negara seperti Tiongkok dan India, yang menjadi konsumen utama. Keanggotaan dalam BRICS memungkinkan Indonesia untuk menegosiasikan tarif preferensial, harmonisasi regulasi, dan pengurangan hambatan non-tarif, yang dapat meningkatkan volume dan stabilitas perdagangan. Selain itu, impor dari negara-negara BRICS, seperti mesin industri dari Tiongkok, produk farmasi dari India, bahan pangan dari Brasil, energi dari Rusia, dan mineral langka dari Afrika Selatan, dapat mendukung hilirisasi industri, ketahanan pangan,

dan transisi energi hijau Indonesia. Dengan memanfaatkan skema kerja sama intra-BRICS, seperti New Development Bank (NDB) dan Contingent Reserve Arrangement (CRA), Indonesia dapat mengakses pembiayaan alternatif yang lebih fleksibel dibandingkan lembaga keuangan Barat, sehingga mengurangi ketergantungan pada dolar AS dan meningkatkan efisiensi transaksi.

BRICS memberikan peluang untuk menarik FDI dari negara-negara anggota yang memiliki kapasitas modal besar, seperti Tiongkok dan India. Indonesia, dengan pasar domestik yang besar, sumber daya alam yang melimpah, dan tenaga kerja yang kompetitif, menjadi tujuan investasi yang menarik. NDB dapat menjadi sumber pendanaan strategis untuk proyek-proyek infrastruktur, seperti transportasi, energi terbarukan, dan teknologi informasi, yang pada gilirannya meningkatkan daya tarik Indonesia bagi investor asing. Sektor energi hijau, manufaktur, dan teknologi digital menjadi bidang prioritas yang dapat diperkuat melalui kolaborasi dengan negara-negara BRICS. Namun, tantangan seperti birokrasi yang kompleks, ketidakpastian regulasi, dan kebutuhan akan reformasi institusional harus diatasi untuk memaksimalkan manfaat FDI.

Keanggotaan BRICS mendukung agenda transformasi Indonesia menuju ekonomi yang lebih mandiri dan berdaya sa Tiongkok dan India, misalnya, dapat membantu Indonesia mengembangkan teknologi pemrosesan bahan mentah dan kawasan industri berbasis nilai tambah. Selain itu, kerja sama dengan Brasil dan Rusia dalam sektor pertanian dan energi dapat memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional. BRICS juga memungkinkan Indonesia untuk mempercepat transisi menuju ekonomi hijau melalui akses ke teknologi dan pendanaan untuk energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, dan panas bumi. Modernisasi sektor pertanian melalui kolaborasi dengan negara-negara BRICS dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing produk pangan Indonesia di pasar global.

BRICS memberikan platform bagi Indonesia untuk memperkuat posisi sebagai middle power yang aktif dalam diplomasi multilateral.

Dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, Indonesia dapat memanfaatkan BRICS untuk menjembatani kepentingan Global South dengan kekuatan global, seperti dalam isu keadilan iklim, reformasi tata kelola global, dan pengurangan kesenjangan pembangunan. Keanggotaan ini juga memungkinkan Indonesia untuk memperluas pengaruhnya di ASEAN dan forum internasional seperti G20 dan PBB, sekaligus menjaga keseimbangan hubungan dengan kekuatan Barat dan Timur. Aliansi strategis dengan negara-negara BRICS, terutama dalam sektor teknologi, energi, dan pertahanan, dapat memperkuat kedaulatan dan stabilitas nasional Indonesia di tengah dinamika geopolitik yang kompleks.

Penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan yang harus dihadapi Indonesia. Secara internal, kesiapan infrastruktur ekonomi, kapasitas birokrasi, dan daya saing industri nasional masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi standar BRICS. Koordinasi antarlembaga pemerintah, seperti Kementerian Luar Negeri, Keuangan, dan Perdagangan, menjadi kunci untuk merumuskan kebijakan yang konsisten dan strategis. Secara eksternal, Indonesia harus mengelola risiko geopolitik, seperti potensi ketegangan dengan negara-negara Barat akibat persepsi kedekatan dengan BRICS, serta persaingan internal dengan anggota BRICS seperti Tiongkok dan India. Proses harmonisasi kebijakan dan standar dalam BRICS juga memerlukan negosiasi yang cermat agar Indonesia tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi aktor utama yang mampu memanfaatkan kerja sama untuk kepentingan nasional.

Penelitian ini memperkaya literatur ekonomi politik internasional dengan mengintegrasikan teori kepentingan nasional dan konsep organisasi internasional. Pendekatan Morgenthau membantu memahami bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan BRICS untuk memajukan kepentingan vital (kedaulatan, keamanan) dan sekunder (ekonomi, diplomasi). Sementara itu, kerangka Keohane dan Nye menjelaskan dinamika BRICS sebagai platform interdependensi kompleks yang memfasilitasi kerja sama melalui pengurangan biaya transaksi dan pembentukan norma bersama. Kombinasi kedua pendekatan ini memberikan analisis yang komprehensif tentang

peluang dan risiko keanggotaan Indonesia, sekaligus mengisi celah literatur yang sebelumnya kurang mengeksplorasi posisi spesifik Indonesia dalam BRICS.

Keanggotaan Indonesia di BRICS memiliki potensi untuk menjadi katalis transformasi ekonomi dan politik nasional. Dengan memanfaatkan peluang ekspor-impor, FDI, dan aliansi strategis, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai kekuatan ekonomi regional dan global. Namun, keberhasilan ini bergantung pada kemampuan Indonesia untuk mengatasi tantangan internal dan eksternal melalui reformasi kebijakan, koordinasi yang solid, dan diplomasi yang proaktif. BRICS bukan hanya forum kerja sama, tetapi juga peluang strategis untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maju yang berdaulat, berdaya saing, dan berperan aktif dalam tatanan dunia multipolar.

6.2 Saran

Untuk memaksimalkan manfaat keanggotaan Indonesia dalam BRICS dan mengatasi tantangan yang telah diidentifikasi, pemerintah Indonesia perlu merumuskan strategi nasional yang komprehensif, terkoordinasi, dan berorientasi jangka panjang. Berikut adalah beberapa saran strategis yang dapat diimplementasikan untuk mendukung kepentingan nasional Indonesia dalam konteks BRICS:

1. Penguatan Koordinasi Antarlembaga Pemerintah

Keanggotaan BRICS melibatkan berbagai dimensi, termasuk ekonomi, politik, dan diplomasi, yang membutuhkan sinergi antar kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan Bappenas. Pemerintah perlu membentuk task force lintas kementerian yang bertugas merumuskan posisi dan prioritas Indonesia dalam BRICS. Task force ini harus memiliki mandat yang jelas untuk mengoordinasikan kebijakan, menghindari tumpang tindih kewenangan, dan memastikan konsistensi dalam negosiasi internasional. Selain itu, pemerintah dapat

mengembangkan platform komunikasi terpadu untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan pengambilan keputusan yang cepat.

2. Reformasi Infrastruktur Ekonomi dan Birokrasi

Untuk memenuhi standar BRICS, Indonesia harus melakukan reformasi infrastruktur ekonomi dan birokrasi. Ini mencakup peningkatan konektivitas logistik, modernisasi pelabuhan dan bandara, serta digitalisasi layanan perizinan untuk mempermudah investasi dan perdagangan. Pemerintah perlu mempercepat implementasi kebijakan seperti single window system untuk ekspor-impor dan memperkuat regulasi yang mendukung kepastian hukum bagi investor. Reformasi birokrasi juga harus diarahkan pada pengurangan kompleksitas perizinan, peningkatan transparansi, dan pemberantasan korupsi untuk meningkatkan kepercayaan investor dari negara-negara BRICS.

3. Peningkatan Daya Saing Industri Nasional

Untuk memanfaatkan peluang ekspor ke pasar BRICS, Indonesia harus meningkatkan daya saing produk melalui inovasi teknologi, sertifikasi standar internasional, dan efisiensi produksi. Pemerintah dapat memberikan insentif kepada pelaku industri, khususnya UMKM, untuk mengadopsi teknologi modern dan meningkatkan kualitas produk, seperti produk halal, agrikultur organik, dan manufaktur bernilai tambah. Program pelatihan dan pendampingan juga perlu diperluas untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam memahami karakteristik pasar BRICS, seperti preferensi konsumen dan regulasi perdagangan.

4. Optimalisasi Pembiayaan dari New Development Bank (NDB)

Indonesia harus secara aktif memanfaatkan NDB sebagai sumber pendanaan alternatif untuk proyek-proyek strategis, seperti infrastruktur transportasi, energi terbarukan, dan kawasan industri. Pemerintah perlu merumuskan proposal proyek yang jelas dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan untuk menarik

pembiayaan dari NDB. Selain itu, Indonesia dapat mengusulkan pengembangan mekanisme pembiayaan berbasis mata uang lokal untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS, sehingga meningkatkan stabilitas fiskal dan efisiensi transaksi.

5. Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Budaya

Diplomasi ekonomi harus menjadi prioritas utama dalam keanggotaan BRICS. Pemerintah perlu meningkatkan kehadiran dalam forum bisnis BRICS, pameran dagang, dan misi perdagangan untuk mempromosikan produk dan potensi investasi Indonesia. Selain itu, diplomasi budaya dapat diperkuat melalui pertukaran budaya, festival seni, dan promosi produk kreatif seperti batik, film, dan kuliner Nusantara. Program seperti beasiswa, pelatihan vokasional, dan pertukaran akademisi dengan negara-negara BRICS dapat meningkatkan kapasitas SDM dan memperkuat soft power Indonesia.

6. Strategi Mitigasi Risiko Geopolitik

Untuk menjaga prinsip politik luar negeri bebas aktif, Indonesia harus mengembangkan strategi yang seimbang dalam hubungannya dengan BRICS dan negara-negara Barat. Pemerintah perlu secara proaktif menjelaskan bahwa keanggotaan BRICS tidak bertentangan dengan hubungan dengan AS atau Uni Eropa, tetapi merupakan bagian dari strategi diversifikasi kerja sama internasional. Diplomasi multilateral harus digunakan untuk menjembatani kepentingan BRICS dengan ASEAN dan forum global lainnya, sehingga Indonesia dapat memainkan peran sebagai bridge builder dalam tatanan dunia multipolar.

7. Pengembangan Peta Jalan Impor Strategis

Untuk memaksimalkan peluang impor dari BRICS, pemerintah perlu menyusun peta jalan impor strategis yang mengidentifikasi sektor-sektor prioritas, seperti teknologi industri, bahan baku farmasi, dan komoditas pangan. Peta jalan ini harus mencakup strategi substitusi impor untuk melindungi industri lokal dari risiko banjir produk murah, serta mekanisme safeguard untuk mencegah praktik dumping.

Harmonisasi standar teknis dan prosedur kepabeanaan dengan negara-negara BRICS juga perlu dipercepat untuk mempermudah arus barang.

8. Fokus pada Hilirisasi dan Ekonomi Hijau

Indonesia harus memanfaatkan kerja sama BRICS untuk mempercepat hilirisasi sumber daya alam dan transisi menuju ekonomi hijau. Kolaborasi dengan Tiongkok dan India dalam teknologi pemrosesan bahan mentah dapat meningkatkan nilai tambah produk seperti nikel dan minyak sawit. Sementara itu, kerja sama dengan Brasil dan Rusia dapat mendukung modernisasi pertanian dan pengembangan energi terbarukan. Pemerintah perlu menetapkan target yang jelas untuk hilirisasi dan emisi nol bersih, dengan memanfaatkan pendanaan dan teknologi dari BRICS.

9. Penguatan Kapasitas SDM dan Riset Bersama

Untuk mendukung transformasi ekonomi, Indonesia perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui kerja sama dengan BRICS. Program beasiswa, pelatihan industri, dan riset bersama dengan universitas dan lembaga penelitian di negara-negara BRICS dapat mempercepat transfer teknologi dan inovasi. Pemerintah juga harus mendorong partisipasi startup dan UMKM dalam ekosistem inovasi BRICS untuk meningkatkan daya saing di sektor digital dan teknologi.

10. Pembangunan Narasi Nasionalisme Ekonomi

Keanggotaan BRICS harus dimanfaatkan untuk memperkuat semangat nasionalisme ekonomi di kalangan masyarakat. Pemerintah dapat meluncurkan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran tentang manfaat BRICS bagi pembangunan nasional, seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor, dan kemandirian teknologi. Narasi ini penting untuk membangun dukungan masyarakat dan memperkuat legitimasi kebijakan luar negeri Indonesia.

Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, Indonesia dapat memaksimalkan peluang ekonomi politik dari keanggotaan BRICS, sekaligus mengelola risiko dan tantangan yang ada. Keberhasilan ini memerlukan komitmen jangka panjang, koordinasi lintas sektor, dan kepemimpinan yang visioner. BRICS bukan hanya platform kerja sama internasional, tetapi juga peluang strategis untuk mempercepat transformasi Indonesia menuju negara maju yang berdaulat, berdaya saing, dan berperan aktif dalam tatanan dunia yang lebih adil dan inklusif.

